

## Mengubah Mental Korpri



From KORAN JAKARTA/MSI

Oleh DR Harliantara, MSI

Peringatan ke-44 Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 29 November 2015 sebaiknya dijadikan momentum mengubah kepribadian, sehingga kinerja mereka sesuai dengan tuntutan zaman. Saat ini Korpri perlu sekolah kepribadian dengan konten disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Tak bisa dimungkiri, hingga kini etos kerja dan mutu pelayanan aparatur sipil negara (ASN) belum optimal. Eksistensi ASN masih menjadi beban berat APBN dan belum mampu meningkatkan produktivitas nasional.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan cerdas

merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah membutuhkan birokrasi yang cerdas dan bersih dari berbagai modus korupsi.

Eksistensi undang-undang tentang kepegawaian nasional sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan ASN, keberadaan Korpri sebagai wadah profesi, mestinya juga diganti. Korpri dalam Undang-Undang ASN perlu direposisi dan dirumuskan kembali visi-misinya agar lebih relevan dengan kebutuhan rakyat dan menghadapi persaingan global.

Program revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo terhadap ASN pada puncak peringatan hari Korpri tahun lalu hingga kini belum bergereget. Kinerja birokrat masih memprihatinkan.

Untuk itu, perlu penerapan dan pengembangan revolusi mental birokrasi. Hal itu searah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat melantik Pamong Praja Muda Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXII tahun 2015 di kampus Jatnangor Sumedang.

Pemerintah bertekad menjadikan IPDN sebagai pusat pengembangan revolusi mental. Ini khususnya wahana revolusi mental bagi para ASN untuk memperbaiki kepribadian, etos kerja, dan kompetensinya. Pengembangan revolusi mental bagi birokrat diharapkan bisa meneguhkan kepribadian bangsa guna menyambut globalisasi.

Masyarakat melihat reformasi birokrasi terhadap aparatur negara selama ini masih utopia. Program reformasi birokrasi gagal. Reformasi hanya berkutat dengan kenaikan gaji dan remunerasi, tetapi belum menyentuh kinerja secara signifikan. Mentalitas feodal birokrat masih kuat sehingga aspek pelayanan kepada rakyat baru sebatas jargon.

Eksistensi IPDN yang diproyeksikan sebagai pusat pengembangan revolusi mental sebaiknya memiliki metode mentrasformasikan diri ASN. Metode tersebut sebaiknya tidak semata berupa doktrin militer, harus dicari cara pengembangan kepribadian sesuai dengan tuntutan zaman

Pengembangan kepribadian birokrasi akan mewarnai kepribadian nasional. Hal itu tecermin dari negara-negara yang memiliki indeks pelayanan birokrasi baik seperti Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok. Birokrasi di negara-negara tersebut mampu melayani publik secara paripurna dan bisa mengikuti kemajuan teknologi. Buah keberhasilan pengembangan birokrasi adalah meneguhkan kepribadian nasional yang berimplikasi membaiknya produktivitas dan terwujudnya ketertiban umum.

### Karakter Bangsa

Dalam domain sosiologi, kepribadian nasional adalah karakteristik bangsa sebagai perwujudan cita-cita, pengalaman sejarah, dan budaya. Nilai-nilai filosofis untuk membangun karakter bangsa dan kepribadian nasional sangat dibutuhkan dalam era globalisasi. Di Indonesia istilah kepribadian nasional masa lalu sering dikemukakan Presiden Soekarno dalam manifesto politiknya yang disingkat Usdek (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin). Semua itu disenyawakan oleh Presiden RI pertama menjadi tajuk Kepribadian Nasional.

Saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddi Chrisnandi sedang melakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS). Moratorium tersebut sebaiknya difokuskan untuk program pengembangan mentalitas dan kepribadian PNS.

Revolusi mental bagi birokrasi di Indonesia tidak boleh dilakukan setengah hati, tapi secara total lewat program pengembangan kepribadian. Indonesia perlu belajar revolusi birokrasi Korea Selatan atau Tiongkok. Korea Selatan menjadi salah satu macan Asia karena telah melakukan revolusi mental birokrasinya sejak 1980. Proyek nasional itu dipelopori Presiden kelima Chun Doo Wan yang meletakkan sejumlah pilar revolusi birokrasi.

Hal serupa juga dilakukan para pemimpin Tiongkok sejak kepemimpinan Deng Xiaoping. Strategi revolusi birokrasi Deng Xiaoping adalah pengembangan kepribadian dan kompetensi birokrasi secara terpadu. Mereka memangkas birokrasi yang sudah tidak bisa dikembangkan. Dalam upaya pengembangan revolusi mental, pemerintahan Jokowi harus tegas dan tidak segan-segan pemutusan hubungan kerja terhadap PNS yang tidak bisa dikembangkan lagi. Hal itu dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif dan bersih dari korupsi. Hingga kini masih banyak PNS berkinerja sangat buruk, tetapi masih tenang menikmati gaji dan remunerasi.

Pemerintahan sebaiknya merestrukturisasi dan mereorganisasi PNS dengan jalan mempermudah PHK bagi pegawai yang berkinerja buruk. Jangan ada lagi rekrutimen PNS yang dipaksakan untuk kebutuhan eselon tidak jelas. Sebagian besar APBN telah tersedot untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mestinya satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dibuat seramping mungkin.

Totalitas reformasi birokrasi telah dipelopori Presiden Joko Widodo yang menjadikan kantor kepresidenan seramping mungkin. Pemerintah lebih menekankan efektifitas kerja Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kantor Presiden. Maka, berbagai kebijakan kantor kepresidenan bersifat: *clarity, consistency, dan commitment* (kejelasan, konsistensi, dan kebulatan tekad). Dengan demikian instruksi presiden bisa dijalankan dengan cepat.

*Penulis Dosen Universitas Sangga Buana Bandung*